

EKONOMI POLITIK INDONESIA KONTEMPORER

— NEGARA, PASAR, DAN KEPENTINGAN PUBLIK —

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

1



NEGARA

- kebijakan publik
- regulasi
- kapasitas negara

2



PASAR

- efisiensi
- inovasi
- investasi

3



KEPENTINGAN PUBLIK

- kesejahteraan
- keadilan sosial
- akses layanan

4



FISKAL & ANGGARAN

- subsidi
- belanja publik
- disiplin fiskal

5



INDUSTRI & HILIRISASI

- nilai tambah
- sumber daya
- daya saing

6



DEMOKRASI & TATA KELOLA

- akuntabilitas
- transparansi
- partisipasi

7



EKONOMI DIGITAL & AI

- transformasi digital
- data
- produktivitas

8



LINGKUNGAN & KEADILAN

- keberlanjutan
- energi transisi
- keadilan antargenerasi



PERTUMBUHAN
INKLUSIF & BERKELANJUTAN
UNTUK INDONESIA MAJU



STABILITAS EKONOMI

Makroekonomi kokoh, inflasi terkendali



SUMBER DAYA MANUSIA

Produktif, adaptif, berdaya saing



INFRASTRUKTUR TERINTEGRASI

Konektivitas untuk pemerataan



KOLABORASI MULTIPIHAK

Negara, pasar, dan masyarakat bersinergi



ARAH STRATEGIS INDONESIA MAJU

Berdaulat, mandiri, dan berkeadilan



NEGARA STRATEGIS

Mengarahkan, mengatur, dan melindungi kepentingan bangsa



PASAR INKLUSIF

Mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan berkelanjutan



PUBLIK BERDAULAT

Masyarakat berdaya, sejahtera, dan berkeadilan sosial



MEMBANGUN EKONOMI POLITIK INDONESIA KONTEMPORER
BERDAULAT | INKLUSIF | BERKELANJUTAN

*Rudy C Tarumingkeng: Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer--
Negara, Pasar, dan Kepentingan Publik*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

12 Juni 2026

EKONOMI POLITIK INDONESIA KONTEMPORER: NEGARA, PASAR, DAN KEPENTINGAN PUBLIK

Abstrak

Artikel ini membahas ekonomi politik Indonesia kontemporer melalui tiga poros utama: negara, pasar, dan kepentingan publik. Dalam dua dekade setelah Reformasi, Indonesia mengalami transformasi kelembagaan yang luas: demokratisasi, desentralisasi, liberalisasi ekonomi terbatas, pertumbuhan kelas menengah, ekspansi infrastruktur, digitalisasi, serta penguatan kembali peran negara dalam pembangunan. Namun transformasi tersebut tidak berlangsung linier. Indonesia kini berada dalam situasi paradoks: pertumbuhan ekonomi relatif stabil, tetapi kualitas pertumbuhan, keadilan distribusi, efektivitas negara, kualitas demokrasi, korupsi, ketahanan fiskal, tekanan nilai tukar, dan daya saing struktural masih menjadi tantangan besar.

Pada 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11%, sementara pertumbuhan kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan, dengan dorongan kuat dari konsumsi pemerintah. IMF memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2026 sekitar 5,0% dengan inflasi 3,0%, sedangkan World Bank memperkirakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh sekitar 5% di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian global. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Pada sisi moneter, Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 menaikkan BI-Rate 25 basis poin menjadi 5,50% untuk menjaga stabilitas Rupiah dan inflasi dalam sasaran. ([Bank Indonesia](#))

Artikel ini berargumen bahwa persoalan utama ekonomi politik Indonesia bukan semata-mata pilihan antara "negara" atau "pasar", melainkan bagaimana negara dan pasar ditempatkan di bawah orientasi kepentingan publik. Negara diperlukan untuk membangun kapasitas industri, menyediakan infrastruktur, menjaga stabilitas, melindungi kelompok rentan, dan mengoreksi kegagalan pasar. Namun negara juga dapat menjadi sumber rente, patronase, dan konsentrasi kekuasaan apabila tidak dikendalikan oleh akuntabilitas demokratis. Pasar diperlukan untuk efisiensi, inovasi, investasi, dan disiplin produktivitas. Namun pasar dapat menghasilkan ketimpangan, eksploitasi sumber daya, dan dominasi oligopolistik apabila tidak diatur secara adil. Karena itu, pembangunan Indonesia kontemporer memerlukan sintesis baru: negara strategis yang akuntabel, pasar yang kompetitif dan inklusif, serta kepentingan publik sebagai prinsip pengarah.

Kata Kunci: *ekonomi politik Indonesia, negara, pasar, kepentingan publik, tata kelola, demokrasi, pembangunan, hilirisasi, fiskal, kesejahteraan.*

1. Pendahuluan

Ekonomi politik Indonesia kontemporer tidak dapat dipahami hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, investasi, atau neraca perdagangan. Angka-angka tersebut penting, tetapi tidak cukup. Di balik angka ekonomi selalu terdapat struktur kekuasaan, pilihan kebijakan, relasi negara dan pasar, distribusi manfaat pembangunan, kualitas institusi, serta pertarungan kepentingan antaraktor. Karena itu, pertanyaan mendasar dalam ekonomi politik bukan hanya "berapa besar ekonomi tumbuh?", melainkan "siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan itu, siapa yang menanggung biayanya, bagaimana keputusan dibuat, dan apakah hasil pembangunan memperkuat kepentingan publik?"

Indonesia adalah negara besar dengan sejarah ekonomi politik yang kompleks. Sejak kemerdekaan, Indonesia terus mencari titik seimbang antara peran negara dan mekanisme pasar. Pada masa awal kemerdekaan, negara dipandang sebagai instrumen utama untuk membangun kedaulatan ekonomi. Pada masa Orde Baru, negara memainkan peran besar dalam stabilisasi, pembangunan infrastruktur, industrialisasi tertentu, dan pengendalian politik, tetapi juga melahirkan patronase, korupsi, serta konsentrasi kekuasaan. Setelah Reformasi 1998, Indonesia memasuki era demokrasi elektoral, desentralisasi, liberalisasi sebagian sektor ekonomi, dan perluasan ruang sipil. Namun Reformasi tidak sepenuhnya membongkar struktur lama. Banyak elite politik-bisnis mampu beradaptasi dengan institusi demokrasi dan pasar baru.

Dalam konteks global 2026, ekonomi politik Indonesia semakin kompleks. Dunia sedang mengalami fragmentasi perdagangan, ketegangan geopolitik, transisi energi, revolusi AI, tekanan fiskal global, serta perubahan pola investasi. Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan strategi lama berupa ekspor komoditas, konsumsi domestik, dan investasi berbasis sumber daya alam. Indonesia harus membangun kapasitas produktif, teknologi, industri bernilai tambah, tata kelola sumber daya alam, perlindungan sosial, serta demokrasi yang kredibel.

Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi dilema klasik negara berkembang: negara harus cukup kuat untuk mengarahkan pembangunan, tetapi tidak boleh terlalu dominan sehingga mematikan kompetisi, menciptakan rente, atau melemahkan akuntabilitas. Pasar harus cukup bebas untuk menghasilkan efisiensi dan inovasi, tetapi tidak boleh dibiarkan bekerja tanpa perlindungan sosial, regulasi persaingan, dan keberlanjutan lingkungan. Kepentingan publik harus menjadi tujuan akhir, tetapi sering kali tersisih oleh kepentingan jangka pendek elektoral, birokratis, korporasi, atau kelompok oligarkis.

Artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana hubungan negara dan pasar membentuk arah pembangunan

Indonesia kontemporer? Kedua, bagaimana kepentingan publik dapat ditempatkan sebagai prinsip pengarah ekonomi politik nasional? Ketiga, strategi apa yang diperlukan agar Indonesia dapat membangun ekonomi yang produktif, adil, demokratis, dan berkelanjutan?

2. Kerangka Konseptual: Negara, Pasar, dan Kepentingan Publik

Ekonomi politik memandang ekonomi bukan sebagai ruang teknis yang netral, melainkan sebagai medan interaksi antara kekuasaan, institusi, aktor, dan distribusi sumber daya. Dalam ekonomi arus utama, pasar sering dilihat sebagai mekanisme alokasi sumber daya melalui harga. Dalam ekonomi politik, harga, upah, tarif, subsidi, pajak, izin usaha, nilai tukar, dan bunga kredit dipahami sebagai hasil dari proses institusional dan politik.

2.1 Negara

Negara adalah aktor yang memiliki kewenangan membuat aturan, memungut pajak, mengalokasikan anggaran, mengatur pasar, menyediakan barang publik, menjaga keamanan, dan menentukan arah pembangunan. Negara tidak selalu identik dengan pemerintah pusat; negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, pemerintah daerah, bank sentral, badan usaha milik negara, lembaga pengawas, dan aparat hukum.

Dalam teori pembangunan, negara yang efektif harus memiliki kapasitas administratif, fiskal, regulatif, dan koordinatif. Negara harus mampu merumuskan kebijakan, mengeksekusinya, menegakkan hukum, mengelola konflik, dan belajar dari kegagalan. Namun negara juga dapat mengalami kegagalan: korupsi, rente, regulasi berlebihan, birokrasi lambat, penangkapan kebijakan oleh elite, dan penyalahgunaan kekuasaan.

2.2 Pasar

Pasar adalah mekanisme pertukaran yang memungkinkan individu dan perusahaan mengambil keputusan produksi, konsumsi, investasi, dan

inovasi. Pasar mendorong efisiensi karena pelaku ekonomi diberi insentif untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Namun pasar tidak selalu menghasilkan hasil sosial terbaik. Pasar dapat gagal karena monopoli, asimetri informasi, eksternalitas lingkungan, barang publik, ketimpangan akses modal, dan eksploitasi tenaga kerja.

Dalam konteks Indonesia, pasar tidak selalu bekerja dalam kondisi kompetisi sempurna. Banyak sektor dipengaruhi oleh izin, konsesi, kedekatan politik, struktur oligopoli, ketergantungan impor, dan dominasi kelompok usaha besar. Karena itu, pasar Indonesia harus dipahami sebagai “pasar yang dilembagakan”, bukan pasar alamiah.

2.3 Kepentingan Publik

Kepentingan publik adalah orientasi kebijakan yang menempatkan kesejahteraan warga, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, keamanan ekonomi, dan hak demokratis sebagai tujuan utama. Kepentingan publik berbeda dari kepentingan negara semata. Negara bisa mengatasnamakan kepentingan publik, tetapi kebijakannya belum tentu benar-benar melayani masyarakat luas. Kepentingan publik juga berbeda dari kepentingan pasar. Pasar dapat menghasilkan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan tidak otomatis adil.

Kepentingan publik harus diuji melalui beberapa pertanyaan: apakah kebijakan meningkatkan kesejahteraan mayoritas warga? Apakah manfaat dan biaya didistribusikan secara adil? Apakah proses pengambilan keputusan transparan? Apakah kelompok rentan dilindungi? Apakah kebijakan menjaga lingkungan hidup? Apakah kebijakan memperkuat kemampuan generasi mendatang?

3. Evolusi Ekonomi Politik Indonesia

3.1 Negara Pembangunan Awal

Pada masa awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia terkait erat dengan proyek kedaulatan nasional. Negara berusaha menguasai sektor strategis, membangun identitas ekonomi nasional, dan mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan kolonial. Namun keterbatasan kapasitas fiskal, konflik politik, inflasi, dan ketidakstabilan kelembagaan membuat strategi ekonomi nasional sulit berjalan efektif.

3.2 Orde Baru: Stabilitas, Pertumbuhan, dan Patronase

Orde Baru membangun stabilitas politik dan ekonomi melalui sentralisasi kekuasaan. Negara berperan besar dalam pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, industrialisasi tertentu, dan pengendalian inflasi. Namun stabilitas itu dibangun dengan biaya politik tinggi: pembatasan kebebasan sipil, sentralisasi birokrasi, militerisasi politik, serta korupsi yang melembaga.

Secara ekonomi, Orde Baru menciptakan pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi juga melahirkan konglomerasi yang dekat dengan kekuasaan. Relasi negara-pasar tidak berbentuk pasar bebas, melainkan kapitalisme patronase: akses terhadap kredit, izin, proyek, dan perlindungan sering kali bergantung pada kedekatan dengan pusat kekuasaan. Krisis Asia 1997–1998 membuka kerentanan model tersebut.

3.3 Reformasi: Demokrasi, Desentralisasi, dan Fragmentasi Kekuasaan

Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi dan desentralisasi. Pemilu kompetitif, kebebasan pers, kebebasan organisasi, dan otonomi daerah mengubah struktur kekuasaan. Namun desentralisasi juga memindahkan sebagian praktik patronase ke daerah. Politik lokal menjadi arena baru hubungan antara kepala daerah, partai politik, pengusaha lokal, birokrasi, dan kelompok kepentingan.

Kajian Hadiz dan Robison tentang oligarki di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan institusional pasca-Orde Baru tidak otomatis menghapus kekuatan lama; banyak kekuatan politik-bisnis justru mampu menyesuaikan diri dengan aturan demokrasi dan pasar baru. Dengan demikian, demokrasi

elektoral dapat berjalan berdampingan dengan konsentrasi kekuasaan ekonomi.

3.4 Era Infrastruktur, Hilirisasi, dan Negara Strategis

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia memperkuat kembali peran negara melalui pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, hilirisasi mineral, penguatan BUMN, dan kebijakan industri. Pergeseran ini mencerminkan perubahan global: banyak negara kembali menggunakan kebijakan industri untuk menghadapi fragmentasi rantai pasok, transisi energi, dan kompetisi teknologi.

Namun, semakin besar peran negara, semakin besar pula kebutuhan akan akuntabilitas. Proyek infrastruktur, hilirisasi, BUMN, dana investasi negara, dan subsidi harus dikelola dengan indikator kinerja yang jelas, audit independen, dan transparansi publik. Tanpa itu, negara strategis dapat berubah menjadi negara rente.

4. Lanskap Ekonomi Indonesia Kontemporer

Indonesia memasuki 2026 dengan ketahanan ekonomi yang relatif baik dibanding banyak negara berkembang lain, tetapi juga dengan tekanan yang meningkat. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi dari 5,03% pada 2024. Pada kuartal I-2026, pertumbuhan mencapai 5,61% secara tahunan, dengan konsumsi pemerintah tumbuh kuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pertumbuhan sekitar 5% menunjukkan stabilitas, tetapi belum cukup untuk transformasi struktural yang cepat. Untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia memerlukan pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan kualitas tenaga kerja, industrialisasi bernilai tambah, inovasi teknologi, dan reformasi tata kelola.

Dari sisi sosial, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 turun menjadi 8,25%, setara 23,36 juta penduduk miskin, menurut BPS. ([Badan](#)

[Pusat Statistik Indonesia](#)) Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 berada di 4,85%, turun tipis dibanding Agustus 2024, dengan rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai sebesar Rp3,33 juta. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Data ini menunjukkan kemajuan, tetapi juga menyisakan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, informalitas, ketimpangan upah, dan daya beli.

Dalam ekonomi politik, pertumbuhan tidak cukup jika tidak disertai pemerataan. Pertumbuhan 5% dapat terlihat baik secara makro, tetapi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, tekanan harga pangan, biaya pendidikan, cicilan, transportasi, energi, dan kesehatan tetap menjadi persoalan nyata. Karena itu, ukuran keberhasilan ekonomi Indonesia harus mencakup kualitas pekerjaan, mobilitas sosial, ketahanan keluarga, akses layanan publik, dan keadilan wilayah.

5. Negara dalam Ekonomi Politik Indonesia

Negara Indonesia memiliki peran besar dalam pembangunan. Peran ini terlihat dalam anggaran, regulasi, BUMN, proyek strategis nasional, kebijakan fiskal, subsidi, perizinan, perlindungan sosial, dan diplomasi ekonomi. Dalam konteks negara berkembang, peran negara memang tidak dapat dihindari. Pasar tidak akan secara otomatis membangun jalan, pelabuhan, pendidikan dasar, kesehatan publik, riset, pertahanan, dan ketahanan pangan.

Namun pertanyaan pentingnya adalah: negara seperti apa yang dibutuhkan? Indonesia membutuhkan negara yang kuat, tetapi bukan negara yang sewenang-wenang. Negara yang aktif, tetapi bukan negara yang boros. Negara yang strategis, tetapi bukan negara yang tertutup. Negara yang mampu mengarahkan pasar, tetapi tidak menundukkan pasar ke dalam patronase.

5.1 Negara sebagai Penyedia Barang Publik

Barang publik seperti keamanan, infrastruktur dasar, data statistik, kesehatan publik, pendidikan, stabilitas moneter, dan perlindungan lingkungan tidak dapat disediakan secara optimal oleh pasar. Negara harus hadir untuk memastikan semua warga memperoleh akses minimum terhadap layanan dasar. Dalam negara kepulauan seperti Indonesia, penyediaan barang publik lebih kompleks karena perbedaan geografis, kepadatan penduduk, kapasitas fiskal daerah, dan ketimpangan infrastruktur.

5.2 Negara sebagai Regulator Pasar

Negara harus mencegah monopoli, kartel, eksploitasi konsumen, kerusakan lingkungan, dan praktik usaha tidak sehat. Regulasi diperlukan agar pasar bekerja secara adil. Namun regulasi juga dapat menjadi alat rente apabila perizinan dibuat rumit, tidak transparan, atau dapat dibeli melalui kedekatan politik. Reformasi regulasi harus diarahkan pada dua tujuan sekaligus: mempermudah usaha produktif dan menutup ruang korupsi.

5.3 Negara sebagai Investor Strategis

Indonesia sedang memperluas instrumen investasi negara, termasuk melalui BUMN dan lembaga investasi strategis. Pada Juni 2026, Danantara Investment Management dilaporkan berhasil menghimpun USD 1,5 miliar dari debut obligasi dolar AS, dengan permintaan investor lebih dari USD 4,6 miliar. ([Reuters](#)) Peristiwa ini memperlihatkan bahwa instrumen negara dapat menarik pembiayaan global, tetapi juga harus dikelola dengan tata kelola yang kuat karena pasar akan menilai kredibilitas, transparansi, dan risiko kebijakan.

Negara sebagai investor strategis dapat menjadi kekuatan pembangunan apabila investasi diarahkan pada sektor produktif: energi bersih, pangan, logistik, pendidikan vokasi, teknologi, riset, kesehatan, dan industri bernilai tambah. Namun apabila investasi negara diarahkan oleh kepentingan politik jangka pendek, ia berisiko menjadi sumber beban fiskal dan moral hazard.

6. Pasar dalam Ekonomi Politik Indonesia

Pasar Indonesia memiliki energi besar: populasi besar, konsumsi domestik luas, kelas menengah, UMKM, ekonomi digital, sumber daya alam, dan jaringan perdagangan regional. Namun pasar Indonesia juga menghadapi hambatan struktural: logistik mahal, kualitas SDM tidak merata, akses pembiayaan terbatas, konsentrasi pasar, kepastian hukum, dan ketergantungan pada komoditas.

6.1 Pasar sebagai Mesin Efisiensi dan Inovasi

Pasar penting karena menciptakan insentif. Perusahaan yang efisien dapat tumbuh, inovasi dapat dihargai, dan konsumen memperoleh pilihan. Ekonomi digital Indonesia menunjukkan bagaimana inovasi pasar dapat memperluas layanan keuangan, transportasi, perdagangan, pendidikan, dan logistik. UMKM dapat menjangkau konsumen lebih luas melalui platform digital.

Namun pasar digital juga menciptakan tantangan baru: dominasi platform besar, ketimpangan data, perlindungan konsumen, pekerja gig, pajak digital, dan keamanan siber. Tanpa regulasi yang cerdas, ekonomi digital dapat menciptakan konsentrasi kekuasaan baru.

6.2 Pasar yang Tidak Netral

Pasar tidak bekerja di ruang kosong. Akses terhadap modal, tanah, izin, jaringan politik, informasi, dan teknologi memengaruhi siapa yang menang dalam persaingan. Pelaku usaha besar sering memiliki kapasitas lebih kuat untuk memengaruhi kebijakan dibanding UMKM. Karena itu, kebijakan persaingan usaha, transparansi perizinan, reformasi pengadaan, dan akses pembiayaan inklusif sangat penting.

6.3 Pasar dan Kepentingan Publik

Pasar harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik. Artinya, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari laba, tetapi juga dari dampaknya

terhadap tenaga kerja, lingkungan, pajak, inovasi, konsumen, dan wilayah. Perusahaan yang memperoleh keuntungan dari sumber daya publik harus memberi kontribusi yang adil kepada masyarakat.

7. Kepentingan Publik sebagai Kompas Pembangunan

Kepentingan publik sering disebut dalam pidato politik, tetapi sulit diwujudkan karena kebijakan publik selalu melibatkan konflik kepentingan. Subsidi energi, misalnya, dapat membantu masyarakat miskin, tetapi jika desainnya tidak tepat, manfaatnya justru lebih banyak dinikmati kelompok mampu. World Bank pada Juni 2026 menyoroti tekanan fiskal Indonesia dan merekomendasikan reformasi subsidi bahan bakar secara bertahap menuju bantuan yang lebih tepat sasaran bagi 40% kelompok terbawah. ([Reuters](#))

Kepentingan publik harus dipahami sebagai keseimbangan antara efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan legitimasi. Kebijakan yang efisien tetapi tidak adil dapat memicu resistensi sosial. Kebijakan yang populis tetapi tidak berkelanjutan dapat membebani fiskal. Kebijakan yang hijau tetapi mengabaikan pekerja dan masyarakat lokal dapat menciptakan konflik. Kebijakan yang pro-investasi tetapi lemah akuntabilitas dapat memperkuat rente.

Dalam konteks Indonesia, kepentingan publik harus mencakup lima dimensi.

Pertama, **kesejahteraan sosial**, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pekerjaan, perlindungan sosial, dan akses layanan dasar.

Kedua, **produktivitas nasional**, yaitu kemampuan ekonomi menghasilkan nilai tambah lebih tinggi melalui teknologi, pendidikan, industri, dan inovasi.

Ketiga, **keadilan wilayah**, yaitu pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, kawasan barat dan timur Indonesia.

Keempat, **keberlanjutan lingkungan**, yaitu perlindungan hutan, laut, air, tanah, udara, dan biodiversitas.

Kelima, **akuntabilitas demokratis**, yaitu hak warga untuk mengetahui, mengawasi, mengkritik, dan berpartisipasi dalam keputusan publik.

8. Fiskal, Subsidi, dan Politik Anggaran

Anggaran negara adalah dokumen ekonomi sekaligus dokumen politik. Di dalam APBN terlihat prioritas negara: siapa yang dibantu, sektor apa yang didorong, wilayah mana yang diprioritaskan, dan risiko apa yang ditanggung. Dalam ekonomi politik, anggaran bukan sekadar angka, melainkan arena distribusi kekuasaan.

Indonesia menghadapi tekanan fiskal dari berbagai arah: kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, subsidi energi, perlindungan sosial, pembayaran bunga utang, transisi energi, dan program prioritas nasional. Ketika harga energi global naik, beban subsidi meningkat. Ketika Rupiah melemah, biaya impor dan pembayaran kewajiban valuta asing dapat meningkat. Ketika suku bunga global tinggi, pembiayaan utang menjadi lebih mahal.

Tantangan fiskal bukan hanya besarnya defisit atau utang, tetapi kualitas belanja. Belanja publik harus menghasilkan produktivitas jangka panjang. Subsidi yang tidak tepat sasaran harus direformasi. Proyek pembangunan harus diuji kelayakannya. Perlindungan sosial harus berbasis data yang akurat. Belanja pendidikan harus meningkatkan mutu pembelajaran, bukan hanya menyerap anggaran. Belanja kesehatan harus memperkuat layanan primer, pencegahan, dan kesiapsiagaan krisis.

Politik anggaran juga harus transparan. Jika publik tidak memahami alasan kenaikan harga, pengurangan subsidi, atau prioritas belanja, kepercayaan dapat turun. Karena itu, reformasi fiskal membutuhkan komunikasi publik yang jujur dan kompensasi sosial yang adil.

9. Bank Sentral, Rupiah, dan Kepercayaan Pasar

Stabilitas moneter adalah bagian penting dari kepentingan publik. Inflasi yang tinggi merugikan rumah tangga miskin karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk pangan dan kebutuhan dasar. Nilai tukar yang terlalu volatil dapat menekan harga impor, beban utang, dan kepercayaan investor. Karena itu, independensi dan kredibilitas bank sentral sangat penting.

Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 menaikkan BI-Rate menjadi 5,50%, Deposit Facility menjadi 4,50%, dan Lending Facility menjadi 6,25%. Keputusan tersebut dinyatakan sebagai langkah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran. ([Bank Indonesia](#)) Reuters juga melaporkan bahwa kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah off-cycle untuk menopang Rupiah yang sedang berada di bawah tekanan kuat. ([Reuters](#))

Dalam ekonomi politik, nilai tukar bukan hanya persoalan teknis pasar uang. Ia mencerminkan kepercayaan terhadap kebijakan fiskal, moneter, neraca eksternal, stabilitas politik, dan tata kelola. Jika investor meragukan arah kebijakan, tekanan terhadap mata uang dapat meningkat. Jika publik meragukan kemampuan pemerintah menjaga harga, ekspektasi inflasi dapat memburuk.

Bank sentral harus menjaga keseimbangan. Suku bunga tinggi dapat membantu stabilisasi Rupiah, tetapi juga dapat menaikkan biaya kredit dan menekan investasi. Suku bunga rendah dapat mendorong pertumbuhan, tetapi berisiko memperlemah mata uang apabila tidak didukung kepercayaan pasar. Karena itu, kebijakan moneter harus didukung kebijakan fiskal yang kredibel dan reformasi struktural yang meningkatkan produktivitas.

10. Hilirisasi dan Kebijakan Industri

Hilirisasi menjadi salah satu tema utama ekonomi politik Indonesia kontemporer. Secara prinsip, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah domestik dari sumber daya alam. Indonesia tidak ingin terus menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi ingin menjadi produsen barang antara dan barang akhir: logam olahan, baterai, kendaraan listrik, petrokimia, produk pangan olahan, dan industri berbasis sumber daya.

Hilirisasi memiliki dasar ekonomi yang kuat apabila dilihat sebagai strategi transformasi struktural. Negara-negara maju umumnya tidak menjadi kaya hanya dengan mengekspor bahan mentah. Mereka membangun industri, teknologi, tenaga kerja terampil, riset, logistik, dan pasar. Namun hilirisasi juga memiliki risiko. Jika terlalu bergantung pada larangan ekspor dan insentif tanpa evaluasi, hilirisasi dapat menciptakan distorsi. Jika energi yang digunakan masih tinggi emisi, produk hilirisasi dapat menghadapi hambatan pasar hijau. Jika tata kelola lingkungan lemah, hilirisasi dapat menimbulkan konflik sosial-ekologis.

Hilirisasi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik. Artinya, hilirisasi harus menghasilkan pekerjaan layak, transfer teknologi, penerimaan negara, perlindungan lingkungan, penguatan industri lokal, dan pembelajaran nasional. Hilirisasi bukan hanya memindahkan smelter ke dalam negeri, tetapi membangun ekosistem industri.

11. BUMN, Danantara, dan Kapitalisme Negara

BUMN memiliki posisi penting dalam ekonomi Indonesia. Di satu sisi, BUMN dapat menjadi alat pembangunan: membangun infrastruktur, menyediakan layanan dasar, menjaga stabilitas pasokan, dan masuk ke sektor yang tidak menarik bagi swasta. Di sisi lain, BUMN dapat menjadi sumber inefisiensi, beban utang, intervensi politik, dan persaingan tidak seimbang dengan swasta.

Kemunculan instrumen investasi negara seperti Danantara memperlihatkan kecenderungan baru kapitalisme negara. Dalam model ini, negara tidak hanya mengatur pasar, tetapi juga menjadi pemilik modal, pengarah investasi, dan pemain strategis. Model ini bukan hal baru di dunia. Banyak negara menggunakan sovereign wealth fund atau development fund untuk mengelola aset dan membiayai proyek strategis.

Namun kapitalisme negara harus dijaga agar tidak berubah menjadi kapitalisme patronase. Ada perbedaan besar antara negara strategis dan negara rente. Negara strategis memilih proyek berdasarkan kelayakan ekonomi, manfaat publik, risiko fiskal, dan visi jangka panjang. Negara rente memilih proyek berdasarkan kedekatan politik, kepentingan kelompok, dan keuntungan jangka pendek.

Karena itu, tata kelola Danantara dan BUMN harus berbasis prinsip: transparansi, audit publik, manajemen profesional, pemisahan fungsi komersial dan penugasan publik, pengawasan parlemen, pengungkapan risiko, serta evaluasi kinerja. Jika tidak, instrumen pembangunan dapat berubah menjadi sumber kerentanan.

12. Demokrasi, Oligarki, dan Tata Kelola

Demokrasi Indonesia adalah salah satu capaian penting Reformasi. Pemilu reguler, kebebasan pers, partai politik, masyarakat sipil, dan desentralisasi menunjukkan perubahan besar dibanding masa otoritarian. Namun demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan: politik uang, dinasti politik, polarisasi, lemahnya kaderisasi partai, korupsi, oligarki, dan pelemahan check and balance.

Freedom House menilai Indonesia telah mencapai kemajuan demokratis sejak 1998, tetapi masih menghadapi tantangan serius seperti korupsi sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, konflik Papua, serta penggunaan hukum pencemaran nama baik dan penodaan agama secara politis. ([Freedom House](#)) Transparency International

mencatat Indonesia memperoleh skor CPI 34 dan berada pada peringkat 109 dari 182 negara dalam indeks persepsi korupsi terbaru yang ditampilkan pada laman Indonesia. ([Transparency.org](https://www.transparency.org))

Dalam ekonomi politik, korupsi bukan hanya penyimpangan moral individu. Korupsi adalah masalah institusional yang memengaruhi biaya usaha, kualitas layanan publik, efektivitas anggaran, keadilan hukum, dan kepercayaan masyarakat. Korupsi membuat pasar tidak kompetitif karena pemenang bukan yang paling efisien, tetapi yang paling dekat dengan kekuasaan. Korupsi juga merusak negara karena kebijakan tidak lagi diarahkan pada kepentingan publik.

Oligarki menjadi tantangan lebih dalam. Oligarki tidak selalu bekerja melalui pelanggaran hukum terbuka. Ia dapat bekerja melalui pendanaan politik, pengaruh media, penguasaan sumber daya alam, akses terhadap perizinan, dan jaringan elite. Demokrasi elektoral dapat tetap berlangsung, tetapi pilihan publik dibatasi oleh struktur kekuasaan ekonomi.

Karena itu, reformasi politik dan ekonomi harus berjalan bersama. Reformasi ekonomi tanpa reformasi politik dapat memperkuat oligarki. Reformasi politik tanpa reformasi ekonomi dapat menghasilkan demokrasi prosedural tanpa keadilan sosial.

13. Desentralisasi dan Kepentingan Daerah

Desentralisasi adalah salah satu perubahan terbesar pasca-Reformasi. Ia memberi ruang bagi daerah untuk mengatur pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Banyak inovasi pelayanan publik lahir dari pemerintah daerah. Namun desentralisasi juga menciptakan tantangan: kapasitas daerah tidak merata, korupsi lokal, dinasti politik, perizinan bermasalah, dan koordinasi pusat-daerah yang kompleks.

Dalam ekonomi politik, daerah bukan hanya unit administratif, tetapi arena kekuasaan. Kepala daerah, DPRD, birokrasi, pengusaha lokal, organisasi

masyarakat, dan pemilih membentuk konfigurasi kepentingan. Kebijakan investasi, tata ruang, tambang, perkebunan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat dipengaruhi politik lokal.

Kepentingan publik di daerah harus dilindungi melalui transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas birokrasi, data terbuka, pengawasan lingkungan, dan perencanaan wilayah berbasis bukti. Desentralisasi yang baik bukan sekadar memberi kewenangan, tetapi memastikan kewenangan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

14. Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Keadilan Antargenerasi

Indonesia kaya sumber daya alam: hutan, laut, mineral, energi, tanah pertanian, biodiversitas, dan potensi energi terbarukan. Kekayaan ini dapat menjadi modal pembangunan, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik dan kerusakan jika tata kelolanya lemah.

Ekonomi politik sumber daya alam selalu melibatkan pertanyaan distribusi. Siapa memperoleh konsesi? Siapa mendapat keuntungan? Siapa kehilangan tanah? Siapa menanggung polusi? Siapa memperoleh pekerjaan? Siapa menerima pajak dan royalti? Siapa mengawasi reklamasi dan pemulihan lingkungan?

Kepentingan publik menuntut agar eksploitasi sumber daya tidak hanya menghasilkan penerimaan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan jangka panjang. Keadilan antargenerasi berarti generasi sekarang tidak boleh menghabiskan modal ekologis yang dibutuhkan generasi mendatang. Pembangunan tidak boleh mengorbankan hutan, air, tanah, laut, dan kesehatan masyarakat demi pertumbuhan jangka pendek.

Transisi energi memberi peluang bagi Indonesia, terutama melalui nikel, baterai, energi panas bumi, surya, hidro, bioenergi, dan ekonomi hijau.

Namun transisi energi harus adil. Masyarakat lokal harus dilibatkan, pekerja sektor lama harus disiapkan, dan standar lingkungan harus ditegakkan.

15. Ekonomi Digital, AI, dan Masa Depan Pasar Kerja

Ekonomi digital mengubah hubungan negara, pasar, dan masyarakat. Platform digital memperluas akses perdagangan, pembayaran, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. AI membuka peluang produktivitas baru dalam analisis data, otomasi administrasi, riset, pemasaran, logistik, pendidikan, dan pemerintahan.

Namun ekonomi digital juga menciptakan ketimpangan baru. Mereka yang memiliki akses internet, perangkat, literasi digital, bahasa, dan keterampilan analitis akan lebih siap. Mereka yang tertinggal secara pendidikan dan infrastruktur akan semakin tertinggal. Karena itu, transformasi digital harus menjadi agenda kepentingan publik, bukan sekadar agenda bisnis.

Negara harus berperan dalam menyediakan infrastruktur digital, perlindungan data pribadi, keamanan siber, literasi digital, pendidikan AI, dan regulasi platform. Pasar harus diberi ruang inovasi, tetapi tidak boleh dibiarkan menguasai data publik tanpa akuntabilitas. Perguruan tinggi harus mempersiapkan generasi muda bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi pencipta, pengelola, dan pengkritik teknologi.

AI juga menuntut etika. Algoritma dapat bias, data dapat disalahgunakan, pekerjaan dapat tergantikan, dan informasi dapat dimanipulasi. Karena itu, ekonomi digital harus diarahkan pada human-centered development: teknologi untuk memperkuat manusia, bukan menggantikan martabat manusia.

16. Kelas Menengah, UMKM, dan Mobilitas Sosial

Kelas menengah adalah fondasi penting stabilitas ekonomi dan demokrasi. Mereka menjadi basis konsumsi, pajak, pendidikan anak, kewirausahaan,

dan partisipasi sosial. Namun kelas menengah Indonesia rentan. Banyak rumah tangga berada sedikit di atas garis kemiskinan dan dapat jatuh kembali akibat sakit, kehilangan pekerjaan, kenaikan harga, bencana, atau utang konsumtif.

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi menghadapi persoalan klasik: akses modal, manajemen, teknologi, kualitas produk, sertifikasi, pemasaran, dan produktivitas. Digitalisasi memberi peluang, tetapi tidak otomatis menyelesaikan masalah. UMKM membutuhkan pendampingan, pembiayaan yang sesuai, integrasi rantai pasok, dan perlindungan dari praktik pasar yang tidak adil.

Mobilitas sosial harus menjadi ukuran utama kepentingan publik. Negara berhasil bukan hanya ketika PDB naik, tetapi ketika anak dari keluarga sederhana dapat memperoleh pendidikan baik, pekerjaan layak, kesehatan memadai, dan kesempatan hidup lebih baik. Jika mobilitas sosial macet, demokrasi akan kehilangan harapan.

17. Politik Pangan, Energi, dan Kesejahteraan

Pangan dan energi adalah dua sektor yang sangat politis karena langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga beras, minyak goreng, BBM, LPG, listrik, dan pupuk memiliki dampak langsung terhadap daya beli dan stabilitas sosial. Karena itu, kebijakan pangan dan energi sering kali menjadi arena kompromi antara efisiensi ekonomi dan stabilitas politik.

Subsidi dapat diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi subsidi yang tidak tepat sasaran dapat membebani anggaran dan menguntungkan kelompok mampu. Reformasi subsidi harus hati-hati karena menyangkut kepercayaan publik. Pengurangan subsidi tanpa perlindungan sosial yang baik dapat memicu resistensi. Sebaliknya, mempertahankan subsidi besar tanpa reformasi dapat mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif.

Kebijakan pangan harus memperhatikan petani dan konsumen sekaligus. Harga terlalu rendah merugikan petani; harga terlalu tinggi merugikan konsumen miskin. Negara harus membangun sistem pangan yang produktif, efisien, adil, dan tahan guncangan iklim.

18. Korupsi, Rente, dan Biaya Ekonomi Politik

Korupsi adalah pajak gelap atas pembangunan. Ia menaikkan biaya proyek, menurunkan kualitas infrastruktur, menghambat investasi, merusak meritokrasi, dan mengurangi kepercayaan publik. Dalam ekonomi politik, korupsi sering terkait dengan rente: keuntungan yang diperoleh bukan karena produktivitas, tetapi karena akses eksklusif terhadap kekuasaan.

Rente dapat muncul dalam konsesi sumber daya alam, perizinan impor, pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, penempatan jabatan, subsidi, dan regulasi. Jika rente terlalu besar, pelaku ekonomi lebih tertarik mencari kedekatan politik daripada meningkatkan produktivitas. Inilah yang disebut rent-seeking economy.

Pemberantasan korupsi tidak cukup melalui penindakan. Ia harus mencakup reformasi sistem: digitalisasi pengadaan, transparansi beneficial ownership, pembatasan konflik kepentingan, pendanaan politik yang transparan, perlindungan pelapor, independensi lembaga pengawas, dan penguatan masyarakat sipil.

19. Model Sintesis: Negara Strategis, Pasar Inklusif, Publik Berdaulat

Indonesia membutuhkan model ekonomi politik yang tidak terjebak dalam dikotomi negara versus pasar. Negara dan pasar sama-sama diperlukan, tetapi keduanya harus tunduk pada kepentingan publik.

Model sintesis ini memiliki tiga pilar.

Pertama, **negara strategis yang akuntabel**. Negara harus mampu mengarahkan pembangunan, tetapi harus terbuka terhadap pengawasan. Kebijakan industri, hilirisasi, investasi negara, BUMN, dan subsidi harus memiliki indikator kinerja dan audit publik.

Kedua, **pasar inklusif yang kompetitif**. Pasar harus memberi ruang bagi inovasi dan efisiensi, tetapi harus dicegah dari monopoli, rente, dan eksploitasi. UMKM, koperasi modern, startup, dan industri lokal harus masuk dalam ekosistem produktif.

Ketiga, **publik berdaulat**. Warga tidak boleh hanya menjadi konsumen atau pemilih lima tahunan. Warga harus menjadi subjek pembangunan: berhak memperoleh informasi, mengawasi kebijakan, berpartisipasi, dan menikmati manfaat pembangunan.

20. Agenda Kebijakan

Ada beberapa agenda strategis yang dapat dirumuskan.

Pertama, memperkuat kualitas belanja publik. APBN dan APBD harus diarahkan pada pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur produktif, perlindungan sosial tepat sasaran, dan transisi energi.

Kedua, memperkuat tata kelola BUMN dan investasi negara. Penugasan publik harus dipisahkan dari fungsi komersial, risiko fiskal harus dibuka, dan proyek harus dinilai berdasarkan manfaat publik.

Ketiga, memperbaiki iklim usaha melalui kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, pemberantasan pungutan liar, dan penguatan persaingan usaha.

Keempat, membangun industrialisasi berbasis pembelajaran. Hilirisasi harus dihubungkan dengan riset, SDM, teknologi, energi bersih, dan industri lokal.

Kelima, memperkuat perlindungan sosial adaptif. Bantuan harus berbasis data, responsif terhadap krisis, dan mendorong mobilitas sosial.

Keenam, memperkuat demokrasi ekonomi. Warga, pekerja, konsumen, petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat adat harus memiliki ruang dalam proses kebijakan.

Ketujuh, membangun kapasitas digital dan AI nasional. Pendidikan tinggi, vokasi, birokrasi, UMKM, dan industri harus dipersiapkan untuk ekonomi berbasis data.

Kedelapan, menegakkan keadilan ekologis. Investasi harus mematuhi standar lingkungan, menghormati masyarakat lokal, dan memperhitungkan biaya ekologis.

21. Kesimpulan

Ekonomi politik Indonesia kontemporer berada pada persimpangan penting. Indonesia memiliki modal besar: stabilitas pertumbuhan, populasi besar, demokrasi elektoral, sumber daya alam, posisi geopolitik strategis, dan potensi ekonomi digital. Namun Indonesia juga menghadapi tantangan serius: kualitas institusi, korupsi, ketimpangan, tekanan fiskal, ketergantungan komoditas, volatilitas nilai tukar, risiko lingkungan, dan kualitas demokrasi.

Relasi negara dan pasar harus dirancang ulang. Negara tidak boleh mundur sepenuhnya karena pembangunan membutuhkan arah, perlindungan, dan investasi publik. Namun negara juga tidak boleh menjadi alat rente. Pasar tidak boleh dimusuhi karena inovasi dan produktivitas membutuhkan insentif. Namun pasar juga tidak boleh dibiarkan menghasilkan ketimpangan dan dominasi oligopolistik. Kepentingan publik harus menjadi kompas utama.

Indonesia membutuhkan negara strategis yang akuntabel, pasar yang inklusif, dan publik yang berdaulat. Inilah fondasi ekonomi politik yang

dapat membawa Indonesia menuju pembangunan yang produktif, adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Glossarium

Akuntabilitas: Kewajiban aktor publik atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan sumber daya, dan hasil kebijakan.

BUMN: Badan Usaha Milik Negara, yaitu perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara.

Desentralisasi: Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu.

Ekonomi Politik: Kajian tentang hubungan antara kekuasaan, institusi, pasar, negara, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat.

Hilirisasi: Strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan domestik sebelum dijual ke pasar.

Kepentingan Publik: Orientasi kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas, keadilan sosial, keberlanjutan, dan hak warga.

Korupsi: Penyalahgunaan kewenangan publik atau organisasi untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau jaringan tertentu.

Negara Strategis: Negara yang aktif mengarahkan pembangunan melalui kebijakan industri, investasi publik, regulasi, dan koordinasi ekonomi, tetapi tetap memerlukan akuntabilitas.

Oligarki: Konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada sekelompok kecil elite yang mampu memengaruhi kebijakan publik.

Pasar Inklusif: Pasar yang memberi ruang partisipasi luas bagi pelaku ekonomi, termasuk UMKM, pekerja, konsumen, dan kelompok rentan.

Patronase: Hubungan politik-ekonomi berbasis pertukaran dukungan dan sumber daya antara patron dan klien.

Rente: Keuntungan ekonomi yang diperoleh bukan melalui produktivitas, melainkan melalui akses istimewa terhadap kekuasaan, izin, atau regulasi.

Rent-seeking: Aktivitas mencari keuntungan melalui manipulasi kebijakan, izin, atau kedekatan politik, bukan melalui inovasi dan efisiensi.

Subsidi Tepat Sasaran: Bantuan pemerintah yang diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan secara luas tanpa seleksi.

Tata Kelola: Sistem aturan, proses, institusi, dan praktik pengambilan keputusan yang menentukan bagaimana kekuasaan digunakan.

Daftar Pustaka

DOI dicantumkan untuk sumber akademik yang memilikinya. Laporan lembaga resmi dan laman data umumnya tidak memiliki DOI.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. <https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>

Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive politics and economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 465–490. <https://doi.org/10.2307/2118470>

Bank Indonesia. (2026). *BI-Rate naik 25 bps menjadi 5,50%*. Bank Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Indonesia's economic growth in Q1-2026 was 5.61 percent (y-on-y)*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026). *In September 2025, the percentage of the poor population decreased to 8.25 percent*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Unemployment rate was 4.85 percent; the average wage of employees was 3.33 million rupiah*. BPS-Statistics Indonesia.

Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security*, 44(1), 42–79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

Freedom House. (2026). *Indonesia: Country profile*. Freedom House.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia and the IMF*. IMF.

Mietzner, M. (2021). Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials. *Democratization*, 28(1), 161–178. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649>

North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>

Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>

Piketty, T., & Saez, E. (2003). Income inequality in the United States, 1913–1998. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 1–39. <https://doi.org/10.1162/00335530360535135>

Rodrik, D. (1998). Why do more open economies have bigger governments? *Journal of Political Economy*, 106(5), 997–1032.

<https://doi.org/10.1086/250038>

Rodrik, D. (2018). Populism and the economics of globalization. *Journal of International Business Policy*, 1, 12–33. <https://doi.org/10.1057/s42214-018-0001-4>

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165.

<https://doi.org/10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85>

Transparency International. (2026). *Indonesia: Corruption perceptions index*. Transparency International.

World Bank. (2026). *Indonesia economic prospects*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 12 Juni 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a2b8882-ddc4-83ec-b5b1-f4776c5b22ed>